

**DAMPAK MASTERPLAN TERHADAP PENINGKATAN
KESEIMBANGAN EKONOMI ANTAR DUSUN
KALURAHAN PUCUNG, KAPANEWON GIRISUBO,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

DEA TIKA QALBINA

NIT.22314228

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

This study analyzes the impact of the Kalurahan Pucung Masterplan on improving economic balance among hamlets, identifies implementation constraints, and formulates solutions to enhance its effectiveness. The study employed a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies. The findings indicate positive impacts on community income, employment opportunities, livelihood diversification, and local economic activities.

Keywords: *Masterplan, Economic Balance, Hamlet, Rural Development*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi Masterplan Kalurahan Pucung terhadap peningkatan keseimbangan ekonomi antar dusun, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masterplan memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, diversifikasi mata pencaharian, dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Kendala implementasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, pemasaran, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, sinergi kelembagaan, dan dukungan pemerintah agar pemerataan pembangunan dan keseimbangan ekonomi antar dusun dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Masterplan, Keseimbangan Ekonomi, Antar Dusun, Pembangunan Desa, Kalurahan Pucung.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
<i>MOTTO</i>	<i>iv</i>
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A.Kajian Literatur	10
B.Kerangka Teoritis	14
C.Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A.Format Penelitian	36
B.Lokasi Penelitian	37

C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Penetapan dan Jumlah Informan	43
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	49
A. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administrasi Kalurahan Pucung	49
B. Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Kalurahan Pucung	52
C. Kondisi Sosial Ekonomi.....	52
D. Program Masterplan Kalurahan Pucung	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Implementasi Masterplan Kalurahan Pucung Tahun 2022-2042.....	60
B. Dampak Masterplan Terhadap Peningkatan Keseimbangan Ekonomi	66
C. Kendala Dalam Implementasi Masterplan	75
D. Solusi Untuk Meningkatkan Efektivitas Masterplan	86
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pedesaan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan ekonomi, tidak hanya antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tetapi juga secara internal antar dusun dalam satu desa. Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan akses terhadap infrastruktur, pelayanan publik, sumber daya ekonomi, serta peluang usaha. Oleh karena itu, diperlukan instrumen perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Penyusunan masterplan desa adalah salah satu cara strategis untuk mengatasi ketimpangan yang ada. Masterplan adalah dokumen yang merencanakan kegiatan dalam jangka menengah hingga panjang, yang menggabungkan kemampuan daerah, kebutuhan penduduk, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan negara. Dengan perencanaan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak, masterplan diharapkan bisa memaksimalkan penggunaan sumber daya desa, memperkuat kegiatan ekonomi lokal, serta membentuk distribusi kesempatan ekonomi yang lebih merata di antara setiap dusun.

Dalam konteks Indonesia, peran masterplan desa semakin penting karena adanya penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta kebijakan Dana Desa. Kebijakan ini memberi kekuasaan dan alat lebih banyak kepada pemerintah desa agar bisa mengurus pembangunan sendiri. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Dana Desa terhadap kesetaraan ekonomi di antara dusun sangat tergantung pada kualitas perencanaan, kemampuan lembaga desa, serta tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, masterplan desa menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya pembangunan dilakukan secara efektif, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan.

Arah pembangunan desa melalui masterplan juga sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam kerangka Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam asta cita presiden dan wakil presiden khususnya dalam kerangka Indonesia Emas 2045 pada nomor enam yang berbunyi “ Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskina”. Dengan demikian, masterplan desa tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis, tetapi juga sebagai instrument strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di tingkat paling bawah dalam struktur masyarakat. Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai program kementerian, terutama melalui Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Program pemberdayaan ekonomi desa, penguatan BUMDes, transformasi ekonomi desa, pengembangan koperasi, hingga dukungan terhadap produk unggulan desa merupakan bentuk konkret intervensi pemerintah untuk mendorong kemandirian dan pemerataan ekonomi desa. Program-program ini memperkuat implementasi masterplan desa sebagai kerangka operasional pembangunan yang terintegrasi. Secara keseluruhan, masterplan desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan keseimbangan ekonomi antar dusun di Indonesia. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh keselarasan antara perencanaan desa, kebijakan nasional, program kementerian, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, partisipatif, dan didukung oleh kebijakan serta program pemerintah yang konsisten, masterplan desa berpotensi menjadi instrumen efektif dalam mendorong pembangunan pedesaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ketimpangan ekonomi antar dusun di Kalurahan Pucung,

Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, merupakan tantangan spesifik yang mencerminkan masalah pembangunan desa di Indonesia secara lebih luas. Kalurahan Pucung, dengan luas wilayah sekitar 155,4401

Ha dan mayoritas penduduk bergantung pada sektor agraria, telah mengoptimalkan potensi lahan pertanian dan pariwisata melalui Masterplan Pembangunan yang disusun pada tahun 2021. Masterplan ini bertujuan untuk mencegah disparitas ekonomi antar dusun dengan fokus pada peningkatan produktivitas lahan dan akses pasar, namun beberapa dusun tetap mengalami keterbelakangan. Implementasi masterplan ini memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat kalurahan, dengan pendekatan sosio-ekologis, partisipatif, dan input-output untuk mengembangkan bidang pertanian, , pariwisata, dan ekonomi. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, pemasaran, dan perencanaan masih menjadi hambatan, sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan zonasi wilayah utara, tengah, dan selatan, dengan milestone pada tahun 2027, 2032, 2037, dan 2042 (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2021).

Masterplan Kalurahan Pucung merupakan arahan pelaksanaan pembangunan, yang hanya bisa terwujud bila segenap elemen kalurahan, terutama Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Pucung bersedia mau bekerjasama dan bersinergi. Berawal dari profil kalurahan yang terdiri dari sumber daya alam, pertanahan dan tata ruang, sumber daya manusia, serta pemerintahan kalurahan, maka berhasil diketahui bahwa Kalurahan Pucung memiliki potensi dibidang pertanian, , pariwisata, dan ekonomi. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Pucung terus menerus berupaya untuk melakukan pembangunan dengan mengatasi problematika yang terkait sumber daya manusia, permodalan, pemasaran, dan perencanaan. Pembangunan dilakukan berdasarkan konsepsi yang terdiri dari tiga pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan sosio ekologis dengan indikator melihat kualitas sumber daya alam, Kelolaan Tata Ruang dan Lahan, Pelestarian Sosial-Budaya, Kedua, pendekatan partisipatif dengan indikator melihat Keterlibatan dalam Perencanaan, Keberdayaan Kelompok Masyarakat, Akses Informasi, Ketiga, pendekatan input output dengan indikator melihat input(Sumber Daya), Output(Produk atau Jasa),

Outcome(Dampak Jangka Menengah). Ketiga pendekatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pembangunan pada bidang pertanian, , pariwisata, dan ekonomi.

Sementara itu, keterbatasan yang dimiliki oleh Kalurahan Pucung diatasi dengan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan zonasi pembangunan, yang terdiri dari: wilayah utara, tengah, dan selatan. Sehingga, pembangunan dilaksanakan secara bertahap hingga menghasilkan milestone atau tonggak pencapaian pada tiap kurun waktu, yaitu: tahun 2027, tahun 2032, tahun 2037, dan tahun 2042(Pemerintah Kalurahan Pucung, 2021). Ketimpangan ekonomi di tingkat desa ini adalah cerminan dari ketimpangan wilayah yang lebih besar, dan menjadi hambatan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mu'minah & Zubakhrum Tjenreng, 2025). Masalah ketimpangan ekonomi di Kalurahan Pucung tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan tantangan pembangunan desa di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Kabupaten Gunungkidul.

Tantangan utama dalam pembangunan desa adalah ketidakseimbangan ekonomi antar dusun atau wilayah internal desa. Banyak desa di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, disparitas ekonomi sering kali disebabkan oleh perbedaan akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Dusun-dusun yang lebih dekat dengan pusat desa atau jalan utama cenderung lebih berkembang, sementara dusun terpencil mengalami stagnasi (Jelvi et al., 2024). Konsentrasi kegiatan ekonomi, akses yang tidak merata terhadap sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik di beberapa dusun tertentu menciptakan perbedaan yang semakin lebar (Rizkina Sari Siregar et al., 2024). Dusun yang tertinggal kesulitan mengembangkan potensi ekonominya, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan (Ressul Ulia et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi memperlemah kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi

kemiskinan (Suryadi, 2009, dikutip dari Warda, 2019). Di tingkat desa, ketimpangan ekonomi ini juga menyulitkan kelompok miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperparah kesenjangan sosial (Warda, 2019).

Secara umum, ketimpangan ekonomi di tingkat desa mencerminkan ketimpangan daerah yang lebih luas di Indonesia, yang berdampak pada keadilan sosial, kestabilan, dan kualitas hidup masyarakat. Mencegah ketimpangan ekonomi antar dusun sangat penting karena ada beberapa alasan. Pertama, ini merupakan syarat penting untuk mencapai keadilan sosial dan ketahanan stabilitas. Ketimpangan yang tidak adil dapat memicu rasa tidak puas, yang selanjutnya memengaruhi ketidakstabilan sosial dan meningkatkan tindakan kriminal (Aisyah, 2023).

Kedua, meratakan pembangunan, termasuk pembagian keuntungan ekonomi secara adil di tingkat dusun, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan sumber daya manusia. Akses yang sama kepada pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kemampuan bekerja dan hasil kerja seseorang, yang merupakan hal penting dalam mengurangi perbedaan pendapatan (Castelló, A., & Doménech, 2002, dikutip dari Warda, 2019).

Upaya yang terencana untuk mencegah dan mengurangi ketimpangan ekonomi di tingkat dusun, seperti kebijakan yang mencakup semua pihak, peningkatan fasilitas yang merata, serta penguatan ekonomi di tingkat lokal, merupakan dasar penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan tingkat mikro, manfaat dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh warga desa, bukan hanya beberapa dusun yang lebih mudah mendapat akses (Aisyah, 2023).

Ketimpangan ekonomi antar dusun yang terjadi karena perbedaan dalam mendapatkan modal, infrastruktur, dan peluang harus ditangani dengan kebijakan yang cerdas dan tepat sasaran. Untuk mencegah ketimpangan di tingkat masyarakat kecil, tidak cukup hanya ada pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga dibutuhkan sistem yang

bisa membagi manfaat dari pembangunan secara adil kepada setiap dusun.

Keseimbangan ekonomi antar dusun dalam Masterplan Kalurahan Pucung diartikan sebagai kondisi dimana setiap dusun memiliki kesempatan yang relatif setara dalam mengakses sumber daya ekonomi, infrastruktur, serta peluang peningkatan pendapatan. Indikator keseimbangan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari pemerataan manfaat pembangunan. Indikator pertama adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Melalui pengembangan sektor unggulan di masing-masing dusun, seperti pertanian, , pariwisata, dan industri rumah tangga, masterplan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Indikator kedua adalah pemerataan kesempatan kerja dan usaha. Masterplan mendorong pengembangan UMKM, BUMDes, serta kegiatan ekonomi berbasis komunitas yang dapat menyerap tenaga kerja lokal di berbagai dusun. Dengan demikian, ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu dapat dikurangi. Indikator ketiga adalah ketersediaan dan pemerataan infrastruktur ekonomi, seperti akses jalan, sarana distribusi, serta fasilitas pendukung produksi. Peningkatan infrastruktur ini berperan penting dalam menurunkan biaya produksi dan distribusi, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi antar dusun. Indikator keempat adalah keberlanjutan dan ketahanan ekonomi lokal. Masterplan menekankan pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berwawasan lingkungan, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi desa dalam jangka panjang.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana implementasi masterplan berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan ekonomi desa, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan desa di masa mendatang. Oleh karena itu diperlukan Penelitian ini untuk mengetahui “Dampak Masterplan Terhadap Peningkatan Keseimbangan Ekonomi Antar Dusun (Studi

Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul)”.
Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul)”).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Masterplan terhadap peningkatan keseimbangan ekonomi antar dusun di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Masterplan untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi antar dusun di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Masterplan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi antar dusun di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dampak masterplan terhadap peningkatan keseimbangan ekonomi antar dusun di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Masterplan guna meningkatkan keseimbangan ekonomi antar dusun di Kalurahan Pucung.
 - c. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas Masterplan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi antar dusun di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. ATR/BPN
 - b. Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi ATR/BPN, hasil Penelitian ini menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program Penataan Aset dan Penataan Akses Reforma Agraria yang telah dijalankan di Kalurahan Pucung. Melalui temuan mengenai dampak masterplan terhadap keseimbangan ekonomi antar

dusun, ATR/BPN dapat memperoleh gambaran nyata mengenai keberhasilan, kendala, serta peluang perbaikan dalam implementasi reforma agraria di tingkat tapak. Informasi ini juga dapat mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti dan memastikan bahwa program-program agraria yang dilaksanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

c. STPN

Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai sumber informasi empiris yang dapat digunakan dalam pengembangan keilmuan dibidang pertanahan, perencanaan spasial, dan reforma agraria. Hasil Penelitian ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap peran STPN dalam pendampingan penyusunan masterplan di Kelurahan Pucung. Selain itu, temuan Penelitian dapat dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran, studi kasus, maupun rujukan akademik bagi mahasiswa dalam memahami implementasi kebijakan agraria secara langsung di lapangan.

d. Kelurahan Pucung

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai dasar evaluasi pembangunan desa yang telah dirumuskan melalui masterplan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang sejauh mana program-program penataan aset dan akses mampu memberikan dampak terhadap peningkatan keseimbangan ekonomi antar dusun. Informasi mengenai keberhasilan maupun kendala ini dapat digunakan oleh pemerintah kalurahan untuk memperbaiki strategi pembangunan, menyusun prioritas baru, serta mengarahkan program kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh dusun di wilayahnya.

e. Calon Peneliti

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan akademik dan keterampilan metodologis dalam memahami implementasi

kebijakan publik, khususnya dibidang reforma agraria dan pembangunan pedesaan. Melalui proses Penelitian, peneliti memperoleh pengalaman empiris mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa. Hasil Penelitian ini juga menjadi kontribusi ilmiah yang dapat digunakan dalam pengembangan pengetahuan, penyusunan tugas akhir, serta sebagai rujukan untuk Penelitian lanjutan mengenai efektivitas masterplan di wilayah lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Masterplan terhadap Peningkatan Keseimbangan Ekonomi Antar Dusun di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak Masterplan terhadap Peningkatan Keseimbangan Ekonomi Antar Dusun

Implementasi Masterplan Kalurahan Pucung memberikan dampak positif terhadap peningkatan keseimbangan ekonomi antar dusun. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses jalan dan sarana pendukung ekonomi, yang mampu memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Selain itu, pengembangan potensi lokal pada sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM telah menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat di beberapa dusun. Masterplan juga mendorong terjadinya keterkaitan ekonomi antar dusun melalui pembagian peran dan spesialisasi potensi wilayah, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya terpusat pada satu dusun, tetapi mulai dirasakan oleh dusun lainnya secara bertahap.

2. Kendala dalam Implementasi Masterplan

Meskipun memberikan dampak positif, implementasi Masterplan Kalurahan Pucung masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi belum meratanya pembangunan infrastruktur antar dusun, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, minimnya akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha lokal, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan desa dalam mengoordinasikan pelaksanaan program. Selain itu, masih terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat antar dusun yang menyebabkan implementasi

program pembangunan belum berjalan secara optimal dan merata.

3. Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Masterplan

Peningkatan efektivitas Masterplan dapat dilakukan melalui penguatan sinergi antara pemerintah kalurahan, pemerintah daerah, lembaga desa, dan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan meliputi pemerataan pembangunan infrastruktur berdasarkan tingkat kebutuhan setiap dusun, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan kelompok usaha, serta peningkatan akses permodalan dan pemasaran produk lokal. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Masterplan agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai target dan mampu menciptakan keseimbangan ekonomi antar dusun secara berkelanjutan

B. Saran

1. Bagi Pemerintahan Kalurahan Pucung

Pemerintah Kalurahan Pucung perlu meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan Masterplan secara konsisten dan berkelanjutan dengan memprioritaskan pembangunan pada dusun-dusun yang masih relatif tertinggal. Pemerintah kalurahan juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait dalam mendukung pembiayaan, pendampingan, dan pengembangan potensi lokal. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antar dusun.

2. Bagi Masyarakat Kalurahan Pucung

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Masterplan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, serta

pemanfaatan potensi lokal di bidang pertanian, pariwisata, dan UMKM. Partisipasi aktif dan kolaborasi antar masyarakat di setiap dusun sangat penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi serta mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di Kalurahan Pucung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif (Patta Rapanna, Ed.; Syakir Media Press, Penerj.). [https://Books.Google.Co.Id/ Books?Id=Jtkreaaaqbaj& Printsec= Frontcover&Hl=Id&Source= Gbs_ Atb#V= Onepage&Q&F=False](https://books.google.co.id/books?id=Jtkreaaaqbaj&printsec=frontcover&hl=id&source=gbbs_atb#v=onepage&q&f=false)
- Aisyah, N. N. (2023). Analisis Penyebab Serta Dampak Kesenjangan Sosial-Ekonomi Pasca Pandemi Beserta Solusi Untuk Mengatasinya. *Proceedings Series Of Educational Studies*, 1. [https://Conference. Um.Ac.Id /Index.Php/ Pses/Article/ Download/8150/2468](https://conference.um.ac.id/index.php/Pses/article/download/8150/2468)
- Andriani, D., Maritasari, D. B., Laela, I., & Husnadia, S. (2025). Pemilihan Teknik Sampling Yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review. *Indo-Mathedu Intellectuals Journal*, 6(4), 6238–6247. [https://Doi.Org/10.54373/ Imej.V6i4.3783](https://doi.org/10.54373/Imej.V6i4.3783)
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (StudiPada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) DiDesa Ponggok, Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 48– 55. [https://Doi.Org/10.18196/Rab.040152](https://doi.org/10.18196/Rab.040152)
- Bouncken, R. B., Czakon, W., & Schmitt, F. (2025). Purposeful Sampling And Saturation In Qualitative Research Methodologies: Recommendations And Review. *Review Of Managerial Science*. [https://Doi.Org/10.1007/S11846-025-00881-2](https://doi.org/10.1007/S11846-025-00881-2)
- Endriyon, E., Gunarto, T., & Murwiati, A. (2025). Measuring The Achievements Of Smart Economics In The Smart Village Program In Lampung Province 2020-2024. *StudiEkonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–60. [https://Doi.Org/10.35912/ Sekp.V3i1.5260](https://doi.org/10.35912/ Sekp.V3i1.5260)
- Fadli, R. , M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. [https:// Doi.Org/ 10.21831/ Hum.V21i1](https://doi.org/10.21831/ Hum.V21i1)

- Jelvi, U. D., Haryadi, A. A., Nusantara, B., Arisandi, M. F., Suparwoko, S., & Ningsih, T. A. R. (2024). Study Of Socio- Economics And Infrastructure Gap In Muja Muju Urban Village, Yogyakarta. *Journal Of Architectural Research And Design Studies*, 8(2), 165. <https://doi.org/10.20885/jars.vol8.iss2.art8>
- Kautsary, J., Puspitasari, A. Y., Rochim, A., & Miranti, A. M. (2022). Proses Perencanaan Masterplan Desa Wisata Hijau Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Gondang Kecamatan Limbangan. Dalam *Pondasi* (Vol. 27). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pondasi/article/download/23107/7114?utm>
- Mu'minah, S., & Zubakhrum Tjenreng, M. B. (2025). Desentralisasi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 8(1), 641–650. <https://ojs.pustek.org/index.php/sjr/article/download/1053/725/1875>
- Nugroho, A. (2020). Riset Agraria. <https://repository.stpn.ac.id/3835/1/metode%20penelitian%20kualitatif-1.pdf?utm>
- Nugroho, A. (2023). Development Of Pucung Village Masterplan Giri Subo District, Gunung Kidul Regency Ariswanto Nugroho. <https://radjapublika.com/index.php/ijerlas>
- Nugroho, A. (2025). Riset Agraria : Dengan Metode Penelitian Kualitatif. *Tangguh Denara Jaya*.
- Pemerintah Kalurahan Pucung, K. G. K. G. K. (2021). Masterplan Kalurahan Pucung. Ressel Uli, A., Rayyan, S., & Ratnawati, E. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat Dengan Redistribusi Pendapatan Nasional Government Efforts To Overcome Economic Inequalities In Society By Redistributing National Income. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 3257–3267. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/download/2108/2159/10310>
- Rini S. Saptaningtyas, Hadiaturrahman, I., Kamil, M. A. A., Bhujangga, I. G. A., Humaida, M., Al Amudi, W. W., Finka, T., Azizzah, F. N., Marchini, M.,

- & Putra, A. Z. (2025). Rancangan Masterplan Desa Wisata Lingsar Dengan Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Wicara Desa*, 3(2), 287–299. <https://doi.org/10.29303/Wicara.V3i2.6775>
- Rizkina Sari Siregar, A., Hamni Lubis, N., Isfa, F., & Muzayyana. (2024). Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 1–10. <https://doi.org/10.55606/Cemerlang.V4i4.3424>
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa Sebagai Kendali Pembangunan Desa Yang Terarah Dan Berkelanjutan. *Journal Of Regional And Rural Development Planning*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.29244/Jp2wd.2021.5.1.15-27>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus. Vol. 2 No. 1 (2021), 2745–7796. <http://repository.uin-susilowati.ac.id/>
- Susilowati, A. P. E., Rachmawati, R., & Rijanta, R. (2025). Smart Village Concept In Indonesia: Ict As Determining Factor. *Heliyon*, 11(1), 23–38. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.E41657>
- Warda, Nila. (2019). Bagaimana Mencegah Peningkatan Ketimpangan Dalam Desa? The Smeru Research Institute. https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/1._Wp_Tifa2_2019-9-6.pdf
- Watif, M., Ramadhani, A., Syam Almazini Tahir, L., Hikmah, N., & Negeri Makassar, U. (2024). Ketimpangan Sosial Dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan. <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/peshum/article/download/3811/3050/780>
- Widyaningrum, D. P., Virgiawan, A., Hidayat, F., Ulumudin, N. M., & Kurnianingtyas, A. P. (2025). Penyusunan Masterplan Pengembangan Desa Ujungnegero Dan Depok Kabupaten Batang Dengan Konsep Sustainable Community Based Tourism. *Jurnal Pengabdian Kolaboratif*, 3(2), 34–42. <https://doi.org/10.26623/Kolaboratif.V3i2.11764>